

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Subsidi Transjakarta Dipangkas

JAKARTA – Subsidi Transjakarta dipangkas Rp1,1 triliun dari usulan Rp4,2 triliun. Pengurangan ini karena Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta 2020 mengalami defisit.

Dengan begitu, subsidi tarif Transjakarta sebesar Rp3,1 triliun. “Dalam rapat Badan Anggaran, Tim Anggaran Pemprov DKI (TAPD) mengusulkan ada komponen Rp1,1 triliun yang bisa dihapus. Ya, kami sepakati,” ujar Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi kemarin.

Dia menuturkan, anggaran subsidi untuk moda transportasi massal (Transjakarta, *light rail transit*/LRT, *mass rapid transit*/MRT) diusulkan mencapai Rp6,7 triliun. Dalam perjalanannya, subsidi Transjakarta disepakati Rp3,1 triliun, kemudian untuk subsidi MRT dan LRT Jakarta tidak berubah yakni Rp3,6 triliun.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menilai besaran Rp3,1 triliun cukup untuk menyubsidi tarif Transjakarta hingga Oktober 2020. Subsidi Rp1,1 triliun rencananya diajukan kembali pada APBD Perubahan 2020. “Tentunya dengan tidak mengurangi standar pelayanan minimum yang sudah ditetapkan,” ucapnya.

Terkait KUA-PPAS 2020, DPRD dan Pemprov DKI telah menyetujui sebesar Rp87,9 triliun. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, setelah pembahasan dan penandatanganan nota kesepahaman KUA-PPAS rampung, pihaknya akan memulai *data entry* untuk publikasi. “Kita ingin pastikan semua kegiatan strategis aman karena menyangkut kepentingan umum yang besar sekali,” ujar Anies.

Menurut dia, Pemprov DKI sangat mendorong pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel, termasuk dalam hal keterbukaan pada setiap tahapan penyusunan Rancangan APBD 2020. Penyusunan RAPBD telah melalui sejumlah prosedur yang berpedoman pada Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Untuk dokumen RKPD 2020 ditetapkan melalui Pergub Nomor 61 Tahun 2019 awal Juli 2019 dan telah dipublikasikan melalui <http://bappeda.jakarta.go.id>.

Kebutuhan Bus dalam Pengembangan Layanan Transjakarta (2018-2021):

10.018 unit

KUA-PPAS 2020 Disepakati

Rp87,9 Triliun

Rp2,7 triliun,” ungkapnya.

PMD untuk Jakpro sempat diturunkan dua kali dari pengajuan awal. Dalam rancangan KUA-PPAS, awalnya Jakpro mengajukan Rp4,6 triliun. Sebelum rapat pimpinan gabungan, Pemprov DKI melakukan penyisiran anggaran secara internal sehingga nilainya turun menjadi Rp3,1 triliun. Dalam rapat tersebut, DPRD juga mempertanyakan rencana pembangunan hotel pada revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Menteng, Jakarta Pusat senilai Rp400 miliar.

Direktur Utama PT Jakpro Dwi Wahyu tidak mampu memaparkan secara sistematis saat rencana pembangunan hotel di TIM dicecar oleh Prasetio dan anggota DPRD lainnya. Bahkan, Ketua DPRD sempat memberikan waktu kepada Jakpro untuk menghitung ulang hingga akhirnya Prasetio memutuskan anggaran pembangunan Rp400 miliar dipangkas. Alhasil, PMD yang diterima Jakpro saat ini menjadi Rp2,7 triliun.

“Jadi, enggak ada hotel karena mereka sudah kami potong Rp400 miliar. Kalau mau revitalisasi, ya revitalisasi yang baiklah. Jangan sampai ada komersialnya, karena kiridankanan (TIM) sudah ada hotel,” kata Pras, yang juga politikus PDIP itu.

● **bima setiyadi**

Portal tersebut dapat diakses terbuka dan diunduh bebas oleh publik. Setelah dokumen RKPD ditetapkan, proses selanjutnya penyusunan KUA-PPAS. Rancangan KUA-PPAS 2020 juga telah disampaikan Gubernur DKI kepada DPRD pada Julialalu.

Setelah seluruh pembahasan selesai di DPRD, dokumen rancangan segera dipublikasikan lewat portal APBD yakni <http://apbd.jakarta.go.id> dan laman terkait lainnya. “Untuk setiap pembahasan RAPBD di DPRD, terbuka untuk umum sebagai bentuk transparansi publik,” ucap Anies.

Ketua DPRD DKI Prasetio meminta Pemprov DKI tidak menyembunyikan usulan anggaran karena berdasarkan rapat pimpinan gabungan banyak bukti adanya anggaran yang disubsidi, misalnya Penyertaan Modal Daerah (PMD) pada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang diturunkan sebesar Rp1,9 triliun.

“Sekarang jadinya (PMD) Rp2,7 triliun dan saat rapat kemarin Jakpro juga tidak mampu meyakinkan saya. Penyisiran di DPRD yang bisa menjawab akhirnya saya putuskan jadi

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Subsidi Transjakarta Dipangkas

ANGGARAN DIKURANGI

Anggaran subsidi transportasi massal khususnya Transjakarta dikurangi dari usulan Rp4,2 triliun menjadi Rp3,1 triliun.



ANGGARAN TRANSPORTASI

Anggaran subsidi moda transportasi massal diusulkan Rp6,7 triliun. Alokasinya Rp4,2 triliun untuk subsidi tarif bus Transjakarta kemudian sisanya untuk subsidi tarif MRT dan LRT Jakarta.

Besaran Rp3,1 triliun cukup untuk mensubsidi tarif Transjakarta hingga Oktober 2020. Subsidi Rp1,1 triliun bakal diajukan kembali pada APBD Perubahan 2020.

Dalam perjalanannya, subsidi Transjakarta dipangkas Rp1,1 triliun karena rancangan KUA-PPAS 2020 defisit sehingga subsidi Transjakarta Rp3,1 triliun.

RINCIANNYA





Sumber: Pemprov DKI/DPRD DKI

MENUJU PENETAPAN APBD

- Dokumen RKPD 2020 ditetapkan melalui Pergub Nomor 61 Tahun 2019 pada Juli lalu dan telah dipublikasikan melalui <http://bappeda.jakarta.go.id>. Portal tersebut dapat diakses secara terbuka dan diunduh bebas oleh publik.
- Setelah dokumen RKPD ditetapkan, proses selanjutnya penyusunan KUA-PPAS. Kemarin nota kesepahaman KUA-PPAS sudah ditandatangani kemudian Pemprov DKI akan memulai *data entry* untuk publikasi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendorong pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel termasuk keterbukaan pada setiap tahapan penyusunan RAPBD 2020.
- Setelah seluruh pembahasan selesai di DPRD, dokumen rancangan akan dipublikasikan pada portal APBD (<http://apbd.jakarta.go.id>) dan *website* terkait lainnya.